

# ANALISIS PAGU INDIKATIF PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)



JUNI 2025

**Pengarah:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Penanggung Jawab:**

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

**Penulis:**

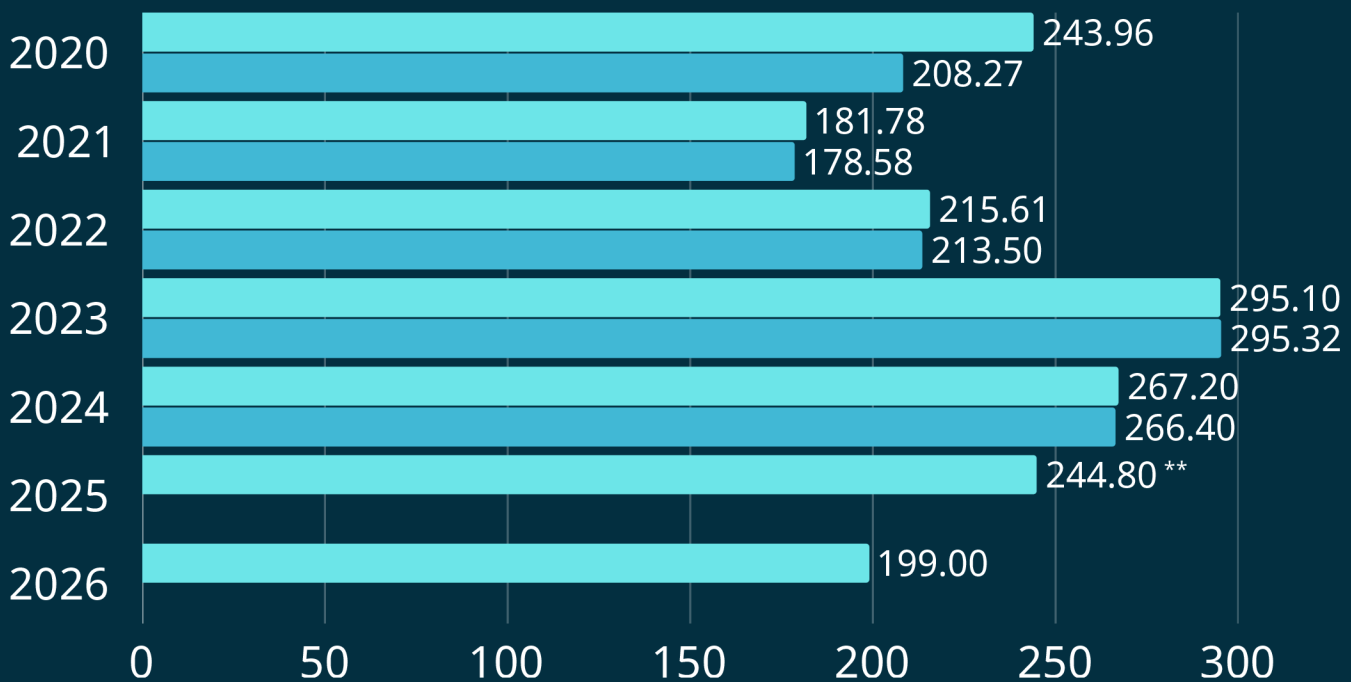
Fachry Ali Firdaus, S.E., Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si., Tio Riyono S.E.

# Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
PPATK dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	06



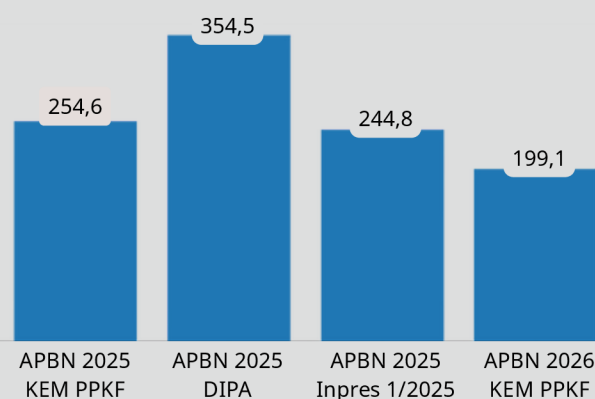
● Anggaran ● Realisasi



Sumber: LHP atas LK PPATK 2020-2023, LRA PPATK 2024, NK APBN 2025, Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026.

\*Dalam miliar rupiah  
\*\*angka setelah inpres 1/2025

**Dinamika APBN PPATK RI 2025 - 2026**  
(dalam miliar rupiah)

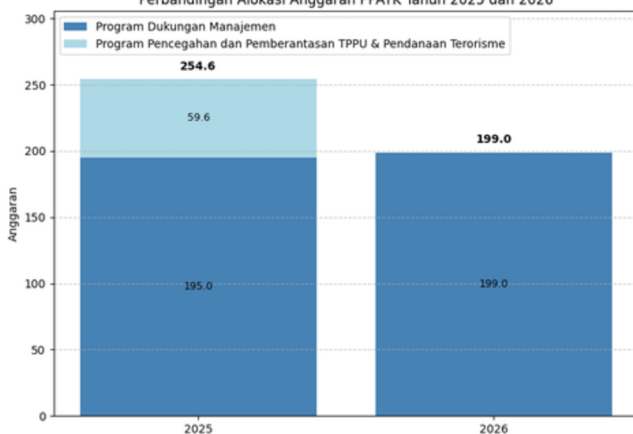


## Pagu Indikatif 2026

Pagu Indikatif PPATK Tahun 2026 sebesar Rp199,1 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp199,1 miliar; dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Rp - miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut secara total menurun sebesar 21,8 persen jika dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 (berdasarkan pagu indikatif) yang sebesar Rp254,6 miliar. Penurunan tersebut semakin besar jika dibandingkan alokasi DIPA pra Inpres 1/2025, yaitu sekitar 43,83% dan 18,6% pasca restrukturisasi dari Inpres 1/2025.

**Perbandingan Alokasi Anggaran PPATK Tahun 2025 dan 2026**



Penurunan total anggaran PPATK dari tahun 2025 ke tahun 2026 adalah sebesar 21.84%.

# Overview Anggaran 2020-2026

HALAMAN 3

## → Analisis Anggaran 2020-2026

Anggaran PPATK mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp295,10 miliar, namun menunjukkan tren penurunan setelah tahun tersebut, dengan anggaran 2026 yang diproyeksikan menjadi Rp199,00 miliar, menjadikannya yang terendah dalam periode 2020-2026.

Sepanjang tahun 2020-2024, realisasi anggaran PPATK secara konsisten menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi dengan rata-rata realisasi 96,48%. Realisasi tertinggi bahkan melampaui 100% pada tahun 2023, mencapai 100,07% (Rp295,32 miliar dari anggaran Rp295,10 miliar)

## → Proporsi Terbesar Anggaran PPATK RI Dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2020, 2022, dan 2023, proporsi terbesar anggaran PPATK dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen berkisar antara 65 - 80%. Proporsi tersebut berfluktuasi namun menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan pagu indikatif 2026, proporsi Program Dukungan Manajemen mencapai 100%.

## → Porsi Belanja Pegawai Menjadi Jenis Belanja Terbesar

Selama periode 2020-2024, realisasi belanja PPATK secara garis besar didominasi oleh Belanja Pegawai yang rata-rata berkontribusi 59,33% dari total Belanja PPATK, diikuti Belanja Barang dengan 29,97%, dan Belanja Modal yang fluktuatif dengan rata-rata 10,70%. Meskipun Belanja Pegawai konsisten sebagai komponen terbesar, porsinya mencapai titik terendah di tahun 2023 sebesar 49,61% (Rp146,52 miliar), yang bersamaan dengan lonjakan Belanja Modal hingga mencapai porsi tertinggi dalam periode ini yaitu 16,82% (Rp49,68 miliar), mengindikasikan adanya prioritas investasi yang signifikan pada tahun tersebut. Namun, tren ini berbalik tajam di tahun 2024, di mana Belanja Modal anjlok drastis ke porsi terendahnya yaitu hanya 0,77% (Rp2,06 miliar), sementara Belanja Pegawai kembali mendominasi dengan mencapai porsi tertinggi dalam periode ini sebesar 66,47% (Rp177,09 miliar).

Sebagai informasi, pada Rapat Kerja dengan Komisi III 12 Februari 2025, disampaikan bahwa dampak restrukturisasi anggaran 2025, menyebabkan Belanja Pegawai TA 2025 masih mengalami kekurangan sebesar Rp41 miliar. Anggaran yang tersedia hanya mencukupi hingga Bulan Agustus 2025.



# Output & Outcome Anggaran 2025 (1)

HALAMAN 4

SASARAN/OUTCOME	KELUARAN/OUTPUT	Perkiraan Volume Target 2025
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang	750
Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi (perkara)	333
	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme (perkara)	309
	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif (perkara)	343
Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional (Rekomendasi Kebijakan)	9

# Output & Outcome Anggaran 2025 (2)

HALAMAN 5

SASARAN/OUTCOME	KELUARAN/OUTPUT	Perkiraan Volume Target 2025
Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Kontribusi dan peran aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF (Rekomendasi Kebijakan)	26
	Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF (Dokumen)	5
	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi (Perkara)	94
	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkotika (Perkara)	5
Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi (Perkara)	2
	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Reaktif sektor Korupsi (Perkara)	5

# PPATK Dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	<b>Asta Cita 7 (PN 07)</b> Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
PROGRAM PRIORITAS (PP)	<b>07.05.</b> Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	<b>01.</b> Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	<b>01.</b> Indeks Integritas Nasional <b>02.</b> Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) <b>03.</b> Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	<b>07.05.04.</b> Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	<b>01.</b> Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<b>01.</b> Persentase capaian implementasi stranas TPPU

## TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS

- Indeks integritas nasional ditargetkan 77,57 di tahun 2029, dengan *baseline* sebesar 70,97 di tahun 2023
- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di tahun 2029 ditargetkan sebesar 4,06, dengan *baseline* di tahun 2024 sebesar 3,85.
- Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang di tahun 2029 ditargetkan sebesar 5,83, dengan *baseline* di tahun 2022 sebesar 5,37.

## TARGET INDIKATOR SASARAN KEGIATAN PRIORITAS

Persentase capaian implementasi Stranas TPPU di 2029 ditargetkan sebesar 100 persen dengan *baseline* 2024 sebesar 75 persen.

Guna mencapai target indikator Program Prioritas, PPATK akan menjalankan Kegiatan Prioritas yang didukung dengan 2 proyek prioritas, yaitu Integrasi Pencegahan TPPU, dan Optimalisasi Pemberantasan TPPU.



# Follow Kami



[www.bkd.dpr.go.id](http://www.bkd.dpr.go.id)



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)